
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERBENGHASILAN RENDAH DI KOTA TANGERANG

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak tempat tinggal dan berkehidupan yang layak, begitu juga dengan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa Pemerintah mempunyai Kewajiban untuk Menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penelitian Implementasi kebijakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang mempunyai tujuan menganalisis Implementasi kebijakan program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan teori model implementasi kebijakan dari Merillee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle (1980) . Berdasarkan hasil Penelitian “ Implementasi kebijakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan di Kota Tangerang telah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari peranan Dinas Perumahan dan Pemukiman terhadap pelaksanaan Program sudah sesuai dengan tugas dan Fungsi. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai salah satu instansi yang mempunyai kewenangan telah melakukan dengan Koordinasi dengan Dinas terkait serta melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur Masyarakat dan juga Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan Keterlibatan Staekholder dalam Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah peranan Pemerintah Daerah sudah optimal tetapi keterlibatan Staekholder terutama peran sektor swasta berupa Program anggaran dari CSR perlu dioptimalkan dalam mendukung keberhasilan Program. Dampak dari Implementasi Kebijakan ini Masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang telah memiliki rumah layak huni dalam lingkungan sehat dan baik.

Tb.Yudi Muhtadi

¹Universitas Islam
Syekh Yusuf
Tangerang
email:
[tubagusyudi1969@
unis.ac.id](mailto:tubagusyudi1969@unis.ac.id)

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

A. PENDAHULUAN

Dalam kontek pembangunan di Indonesia menganut pada Trilogi Pembangunan yaitu Stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan. Pembangunan di Indonesia tidak saja bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetap harus juga memperhatikan bagaimana

pertumbuhan ekonomi itu berdampak pada kesejahteraan semua warga negara.

Mengacu pasal 28 H UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kondisi ini menjadi agenda pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah menjadi bagian hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Untuk memperkuat semua warga negara mempunyai hak untuk hidup layak terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah Negara mengamanatkan dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program-program penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman. Dalam penyediaan rumah layak huni kemampuan pemerintah masih terbatas dalam sistem kepemilikan rumah, hanya masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas yang mampu dan sanggup memiliki rumah layak bagi tempat tinggalnya, sementara pada MBR tinggal pada lingkungan dan rumah yang tidak layak. Oleh karena itu sebagai langkah lain dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi MBR, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan pengembangan dan pendayagunaan potensi Keswadayaan Masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 13-PRT-M2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi MBR, sehingga sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak di Indonesia, pemerintah pusat memberikan wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk ikut memenuhi Kota kebutuhan dasar tersebut di daerahnya. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Dalam menjawab pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak. Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2016 sudah mengerjakan Pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni yang selanjutnya di singkat dengan RTLH sebanyak 1.405 unit. Pada tahun 2017 dianggarkan sebanyak 1.500 unit untuk rehab berat dan 814 unit untuk rehab sedang, sehingga total yang perbaikan berjumlah 2314 unit dan di 2018 sebanyak 1000 sedangkan di tahun 2019 anggaran rehab dialihkan pada penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti mempunyai kepentingan untuk meneliti “ Implementasi Kebijakan Program Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang “.

Dalam Penelitian ini Peneliti menfokuskan Pada “ Implementasi Kebijakan Program Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang “.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahu Efektifitas Implementasi Kebijakan Program Penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Dampak Implementasi Kebijakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengembangan kajian ilmu administrasi publik terutama pada kajian implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis : Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa usul dan saran kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan program agar dapat lebih optimal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ‘ *Implementasi kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang* ‘ menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sedangkan Menurut Erickson (1968) dalam (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka

Berdasarkan penjelasan teori tersebut diatas bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena di lokasi yang menjadi fokus dan lokasi penelitian dengan menggunakan metode yang ada serta teknik yang digunakan dengan menggambarkan secara naratif.

Untuk menggambarkan secara naratif peneliti yang akan menganalisa “ Implementasi kebijakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang “ Peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi literatur

dengan berbagai sumber untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang .

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kebijakan Publik

Untuk memperkuat penelitian implementasi kebijakan peneliti mencoba untuk melakukan pendekatan beberapa literatur berkaitan definisi Kebijakan publik dan teori Implementasi Kebijakan.

Kebijakan Publik atau (Public Policy) merupakan suatu atauran yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya dimana setiap yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dimana sanksi akan dijatuhkan kepada masyarakat oleh Lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Sedangkan menurut Anderson (1990: 3) yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut :

“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Yang artinya kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.” (Friedrich dalam Agustino, 2017: 17)

b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Dari literatur berkaitan dengan pengertian definisi Implementasi kebijakan, bahwa implementasi kebijakan merupakan proses peraturan yang berbentuk dalam tindakan. Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, maka adanya implementasi sebagai pelaksana / penerapan yang disusun secara rinci dalam pembuatan kebijakan program maupun kebijakan publik.

Munurut Van Meter dan Van Horn (1975: 65) dalam Leo Agustino (2017: 128), mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Sedangkan Merilee S. Grindle (1980) dalam Leo Agustino (2017: 142), mengatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group*, dan perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya

dengan rinci, dan apakah sebuah program di dukung oleh sumber daya yang memadai.

c. Model-model Implementasi Kebijakan

Berkaitan Model Impelementasi Kebijakan yang efektif Peneliti menggunakan refrensi teori implementasi dari beberapa ahli diantaranya Grindle. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).

Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of impelementation*) yaitu dalam Subarsono (2011: 93:

a. *Content of Policy* meliputi:

1. Jenis manfaat yang dihasilkan. Point ini *content of policy* mempunyai upaya guna memberikan petunjuk atau menjelaskan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
2. Derajat perubahan yang diinginkan. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin di capai. Adapun yang ingin dijelaskan pada pola ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
3. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
4. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan suatu kebijakan pasti mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
5. Sumber daya yang dihasilkan, sumber daya yang di hasilkan yaitu sumber daya yang digunakan dalam program ini.

b. *Context of policy* meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Suatu kebijakan harus harus mempunyai perhitungan dan mempunyai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan beserta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak berhasil dengan baik.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa. lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya,

maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada pola ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

d. Pengertian rumah layak huni

Untuk Mendefinisikan Pengertian Rumah Layak Huni Peneliti menggunakan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang dimaksud dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembayaran, serta peran masyarakat.. Dalam Undang-undang Nomor 1 Pasal 19 Tahun 2011 yaitu penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

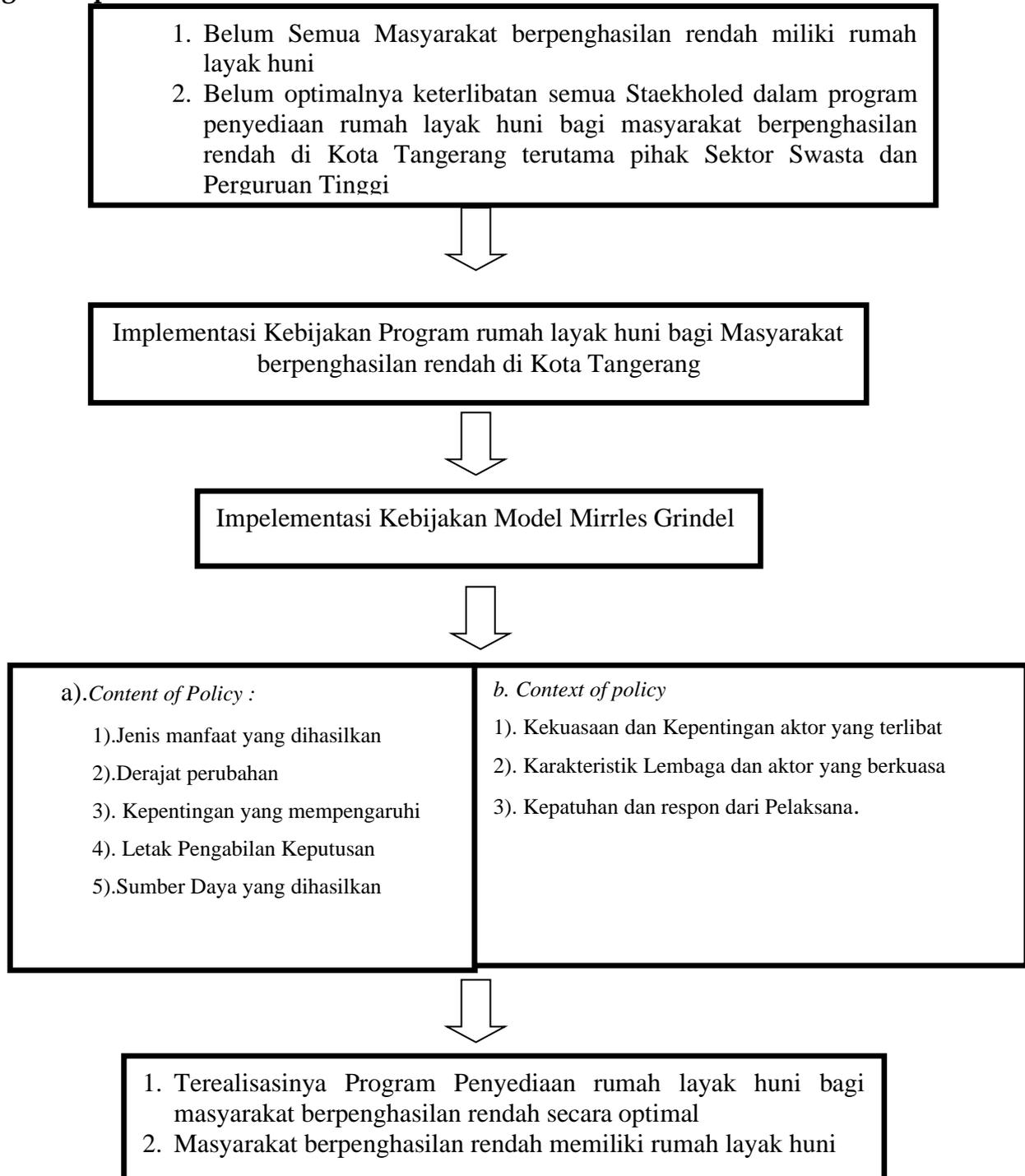
e. Pengertian Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Permenpera No. 5/Permen/M/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Dalam peraturan tersebut disebutkan pada Kelompok Sasaran dan Pilihan Subsidi Perumahan Pasal 2 Ayat (1) bahwa kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut: Kelompok I 1.700.000 < Penghasilan < 2.500.000; Kelompok II 1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000; dan Kelompok III Penghasilan < 1.000.000.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir tersebut dapat dilihat melalui gambar bagan berikut ini:

Kerangka Berpikir



C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

a). *Content of Policy* :

- 1). Jenis manfaat yang dihasilkan

Implementasi kebijakan penyediaan rumah masyarakat huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang bersama masyarakat telah membawa dampak dan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dimana kalangan masyarakat berpenghasilan rendah telah memiliki rumah layak huni dan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan.

2). Derajat perubahan

Derajat perubahan pada implementasi kebijakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah merubah pola kehidupan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak sesuai standar kesehatan dan lingkungan yang baik disamping juga telah merubah lingkungan yang tidak baik menjadi baik serta mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Tangerang.

3). Kepentingan yang mempengaruhi

Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh Kepentingan yang mempengaruhi pada semua stakeholder. Implementasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah dilaksanakan secara baik, dimana semua stakeholder mulai dari unsur pemerintah daerah, masyarakat dan akademis turut berperan aktif dalam program sesuai dengan tugas dan fungsi, untuk mengoptimalkan program ini unsur swasta berkaitan alokasi anggaran dalam bentuk CSR serta Perguruan Tinggi dalam bentuk Program Pengabdian Masyarakat untuk terus dioptimalkan.

4). Letak Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil pemerintah daerah Kota Tangerang dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah suatu keputusan yang sangat tepat, keputusan ini dilakukan bukan hanya karena amanat dari sebuah konstitusi dan juga regulasi tetapi ini diambil karena adanya komitmen yang sangat baik dari Pemerintah daerah Kota Tangerang untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakatnya.

5). Sumber Daya yang dihasilkan untuk keberhasilan kebijakan

Keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang dalam implementasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang karena didukung oleh anggaran yang sangat baik di APBD Kota Tangerang serta didukung sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman serta sarana prasarana dan juga dukungan sumber daya manusia dari unsur masyarakat dan perguruan tinggi.

b. *Context of policy*

1). Kekuasaan dan Kepentingan aktor yang terlibat

Pemerintah Daerah Kota Tangerang dibawah Kepemimpinan H. Arief Rachadiono Wismanyah, Bsc, M. Kes sebagai Walikota Tangerang dan H. Sachrudin sebagai Wakil Walikota mempunyai komitmen yang kuat dalam Program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

berpenghasilan rendah sehingga dengan komitmen yang kuat dari aktor kekuasaan program ini dapat berjalan dengan baik.

2). Karakteristik Lembaga dan aktor yang berkuasa

Karakteristik Lembaga dan aktor yang berkuasa sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Pemerintah Kota Tangerang dibawah Kepemimpinan H.Arief Rachadiono Wismansyah,Bsc,M.Kes sebagai Walikota Tangerang dan Drs.H.Sachrudin sebagai Wakil Walikota memiliki Karakter responship dan Partisipatif serta akomodatif yang sangat baik dalam implemementasi kebijakan hal ini sesuai dengan Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

3). Kepatuhan dan respon dari Pelaksana.

Implementasi Kebijakan Program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang berjalan dengan baik karena kepatuhan dan respon dari pelaksana berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing begitu juga respon yang sangat baik dari penerima manfaat dimana masyarakat penerima serta unsur masyarakat lain ikut partisipasi dalam keberhasilan program.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a). Kesimpulan

Penelitian berkaitan “Implementasi Kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang’ telah berjalan dengan baik. Keberhasilan dari kebijakan ini disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Tangerang serta dukungan sumber daya manusia dan juga dukungan anggaran serta sarana dan prasarana sangat baik. Partisipasi dari seluruh Staekholder terutama dari unsur masyarakat diantaranya Badan Keswadayaan Masyarakat dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga dari kalangan perguruan tinggi sangat kuat.

Respon dan dampak dari kebijakan ini sangat kuat hal ini dilihat dari respon aktor pelaksana bekerja seusiai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai keberhasilan program begitu juga respon dari penerima manfaat respon sangat baik dimana penerima manfaat turut aktif dalam mengerjakan rumah yang akan direhab dengan harapan mereka memiliki rumah dengan lingkungan sehat dan baik.

b). Saran-Saran

Berdasarkan analisa data dalam Penelitian “ Implementasi Kebijakan Program Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang agar dapat berjalan lebih optimal, dengan ini peneliti memberikan saran antara lain :

1. Progam Implementasi Kebijakan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah dalam bentuk Rehab Rumah di Kota Tangerang untuk terus dilanjutkan sampai semua masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang memiliki rumah layak Huni

2. Partisipasi dan dukungan dari Seluruh Staekholder yaitu Pemerintah, Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, Media Massa dan Masyarakat perlu terus di Optimalkan berdasarkan tugas dan peranan masing-masing
3. Peningkatan anggaran Rehab dan jumlah penerima manfaat setiap tahun nya perlu ditingkatkan hal ini untuk mempercepat tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Peranan sektor swasta terutama penggunaan dana CSR pada Program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus segera di optimalkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M.B, dan Huberman, A.M. 2009. *Aanalisis Data Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Olsen, W. 2004. *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed*. Dalam M. Holborn, Ormskirk (Eds) *Development in Sociology*. New York: Causeway Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A.S. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG.2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi*.

Kebijakan-Kebijakan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf H
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-undang Nomor 1 Pasal 19 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Permen PUPR Nomor 13-PRT-M 2016 tentang Bantuan Swadaya Bagi MBR
- Permenpera No 5/Permen/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman